

SIKAP PERUSAHAAN TERHADAP PELAKSANAAN CSR DI KABUPATEN SIDOARJO

Naskah diterima Tgl 18 Juni, Naskah disetujui Tgl. 30 November 2012

Munari (Staf pada Bappeda Kab. Sidoarjo)
Jl. Sultan Agung No.13 Sidoarjo, No. Tlp 031-8940 180, Hp. 08175051352
Email : mkustanto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan-perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan program-program CSR sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap perusahaan yang disurvei berada pada tingkatan defensif atas keberadaan CSR. Belum sampai kepada tahapan yang akomodatif dan pro aktif. Hal ini diindikasikan dengan laporan tahunan atau annual report terkait dengan lingkungan sosial masyarakat masih bersifat internal (75%) dan belum disampaikan kepada publik (25%). Juga top manajemen belum sepenuhnya mendukung karyawan dan masyarakat untuk dilibatkan secara besar-besaran pada pelatihan-pelatihan terkait dengan isu-isu lingkungan sosial masyarakat.

Kata kunci : CSR, perusahaan, Pemkab Sidoarjo

THE POLICY OF COMPANY TO THE CSR REALIZATION IN SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

Coorporate social responsibility or CSR is very important for empowering the people who live around the industry company. The goal of the research is for being CSR programs as a empowering tools in order to decrease the poverty index and unemployment in Sidoarjo Regency. By using the descriptive statistics analysis, the result of research shown those companies in Sidoarjo regency have a defensive attide considering CSR. In generally they don't accomodate and pro- active yet related with CSR existence. It's indicated by annual report of society social environment just for internal necessity (75%) not for publics necessity (25%). Also that top management not support yet the employee and the people involved for training programs concerning to the society social environment issues.

Keywords : CSR, company, Sidoarjo Regency

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya memberantas kemiskinan dan pengangguran merupakan tugas yang sangat serius dan berat bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2010 berpenduduk 2.031.362 jiwa. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun

oleh pemerintah daerah.

Program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran antara lain adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), beras miskin (Raskin), program aksi mengatasi dampak kenaikan BBM (PAM-DKB) dan lain-lain. Namun dampak dari upaya-upaya tersebut masih belum signifikan. Artinya jumlah

penduduk miskin dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Di Jawa Timur sendiri yang berpenduduk \pm 38 juta jiwa angka kemiskinan pada tahun 2010 berkisar antara 6 - 7% dari total jumlah penduduk. Sedangkan tingkat penganggurannya kurang lebih sama yaitu sekitar 7% dari total jumlah penduduk.

Sementara angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo meskipun belum terdeteksi angka-angkanya, bukan berarti Kabupaten Sidoarjo terbebas dari problem kemiskinan dan pengangguran. Apalagi pada tahun 2006 yang lalu, tepatnya tanggal 29 Mei, telah terjadi tragedi semburan lumpur Lapindo yang memporakporandakan perekonomian dan tata kehidupan sebagian masyarakat Sidoarjo. Tragedi tersebut telah membangkrutkan dan menutup puluhan bahkan ratusan perusahaan-perusahaan skala besar, sedang, maupun kecil, sehingga diyakini akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut akan menambah panjang deretan penduduk miskin dan jumlah angka pengangguran.

Problem kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo di era pasca reformasi ini harus lebih mendorong pemerintah setempat untuk segera dan sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan roda pemerintahan atau menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab hal ini akan lebih meringankan tugas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena dalam konsep *good governance* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata diselenggarakan oleh pemerintahan setempat atau negara (*state*) saja, tetapi penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan seluruh elemen, yaitu elemen masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*).

Pada tingkatan inilah peran serta pihak swasta (*private sector*) atau perusahaan-perusahaan dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran lewat program *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Peran dan keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan program CSR dalam bentuk kepedulian terhadap sosial dan lingkungan termasuk masyarakat di sekitar perusahaan tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada pasal 74 ayat 1,2,3, dan 4. Dimana

perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Lebih lanjut tanggung jawab sosial tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang di anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap perusahaan dan pelaksanaan program CSR, khususnya perusahaan-perusahaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap perusahaan terhadap pelaksanaan program CSR dan berapa jumlah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang telah melaksanakan program CSR. Serta apakah program-programnya sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mampu memberdayakan masyarakat disekitarnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadikan program-program CSR sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORI

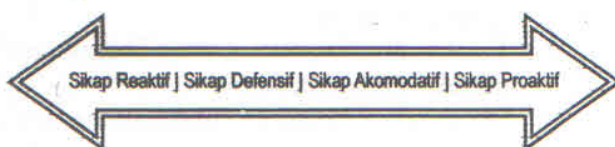
Atas dasar perkembangan CSR, Carrol (1991) dalam Maksun (2003) "Pelaksanaan Program CSR Perusahaan", mengatakan, bahwa dalam menjalankan program CSR ada beberapa karakteristik tipe perusahaan dalam menyikapi CSR yaitu:

- a. Sikap reaktif yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan, diantaranya:
 - 1) Tidak ada dukungan dari manajemen;
 - 2) Manajemen merasa entitas sosial itu tidak mungkin;
 - 3) Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan, dan;
 - 4) Tidak ada dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.
- b. Sikap defensif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum

atas komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya sebagai berikut:

- 1) Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dipandang perlu;
 - 2) Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan, dan
 - 3) Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan
- c. Sikap akomodatif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungannya.
- 1) Terdapat beberapa kebijakan Top Manajemen tentang lingkungan sosial;
 - 2) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal, dan
 - 3) Terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- d. Sikap proaktif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dimana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya
- 1) Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan;
 - 2) Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan eksternal perusahaan,
 - 3) Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan.

Dari keempat tipe karakteristik perusahaan dalam menyikapi CSR tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Tingkatan Terendah Tingkatan Tertinggi
Tanggung Jawab Sosial Tanggung Jawab Sosial

Gambar : Pendekatan Tanggung Jawab Sosial

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi manfaatnya adalah penelitian terapan. Berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian eksploratif dan evaluatif. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data tentang program-program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. kondisi riil pelaksanaan program CSR terhadap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Data sekunder terdiri dari data tentang jumlah dan karakteristik perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Metode perolehan data primer diperoleh dengan cara menggali langsung dari sumber data, yaitu dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dan masyarakat penerima program CSR dari perusahaan-perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan responden sebanyak 30 perusahaan, sedangkan jumlah responden yang berasal dari masyarakat yang ikut merasakan program CSR sebanyak 150 responden.

Sementara data sekunder diperoleh dari pihak kedua, yaitu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sampel diambil masing-masing 5 perusahaan dari setiap kecamatan dari jumlah total kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 18 kecamatan. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan ada sebanyak 90 perusahaan. Jumlah sampel sebanyak 90 perusahaan tersebut diambil berdasarkan pendapat dari Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (2006) yang mengusulkan bahwa ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam kriteria-kriteria tertentu dengan maksud agar mudah membacanya, memahami, dan menganalisis. Setelah data sekunder dan primer diolah dan disusun sedemikian rupa, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan CSR yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disikapi beragam oleh perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan yang berpendapat bahwa program CSR sifatnya adalah sukarela dan ada yang berpendapat bahwa program CSR sifatnya wajib.

Untuk melihat sikap perusahaan-perusahaan terhadap keberadaan CSR dapat diukur dengan menetapkan 4 (empat) kriteria ukuran, yaitu sikap reaktif, defensif, pro aktif, dan akomodatif.

1. Sikap Reaktif

Sikap reaktif dapat diketahui dari 4 (empat) faktor, yaitu pertama, ada tidaknya dukungan pihak manajemen perusahaan atas pelaksanaan CSR di wilayah operasinya dalam hal ini adalah kabupaten Sidoarjo. Kedua, tingkat kepercayaan perusahaan bahwa entitas sosial atau masyarakat sosial itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Ketiga adalah kemauan untuk melaporkan tentang kondisi lingkungan sosial perusahaan baik kepada pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Dan yang keempat adalah kepedulian pihak manajemen untuk melakukan pelatihan atau pemberdayaan kepada entitas sosial atau masyarakat sosial disekitar perusahaan secara rutin atau berkala.

Dari hasil survei yang dilakukan atas responden diperoleh hasil bahwa dukungan pihak manajemen perusahaan atas pelaksanaan CSR sebanyak 92% mendukung, artinya ada dukungan dari pihak manajemen perusahaan atas pelaksanaan CSR di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hanya 8% yang tidak mendukung karena menurut perusahaan yang bersangkutan perusahaan belum mempunyai kebijakan terkait dengan pelaksanaan CSR.

Selanjutnya terkait dengan tingkat kepercayaan perusahaan bahwa entitas sosial atau masyarakat sosial itu merupakan tanggung jawab perusahaan, sebanyak 83% responden percaya bahwa entitas sosial atau masyarakat sosial merupakan tanggung jawab perusahaan karena perusahaan merasa dalam kesehariannya hidup berdampingan dengan masyarakat dan lingkungannya. Sementara sebanyak 17% merasa bahwa entitas sosial atau

masyarakat sosial bukan merupakan tanggung jawab perusahaan karena perusahaan yang berangkutan merupakan perusahaan kecil. Atau perusahaan beranggapan akan melaksanakan program CSR jika diminta. Alasan lain perusahaan menolak pelaksanaan program CSR karena entitas sosial tidak selalu merupakan tanggung jawab perusahaan. Mereka beranggapan yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sosial hanya pada sisi pemberdayaannya. Atau bahwa masyarakat sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, warga setempat, dan perusahaan.

Kemauan perusahaan untuk melaporkan tentang kondisi lingkungan sosial perusahaan baik kepada pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan sebesar 87,5% tidak melaporkan kondisi lingkungannya ke pihak luar. Kondisi lingkungan sosial perusahaan dicatat dan diketahui hanya untuk kepentingan intern. Namun sebesar 12,5% ada perusahaan-perusahaan yang melaporkan kondisi lingkungan sosial perusahaan ke pihak luar.

Selanjutnya adalah kepedulian pihak manajemen untuk melakukan pelatihan atau pemberdayaan kepada entitas sosial atau masyarakat sosial disekitar perusahaan secara rutin atau berkala. Dari data-data yang diperoleh sebanyak 46% melakukan pelatihan, misalnya pelatihan UKM/kewirausahaan di balai desa. Memberikan pelatihan dengan cara membuka kesempatan untuk bekerja magang di perusahaan. Atau memberikan pelatihan kepada karang karuna dalam bidang budidaya ikan, dan pelatihan komputer.

Sementara 54% perusahaan tidak memberikan pelatihan kepada warga masyarakat disekitar perusahaan karena keterbatasan dana. Perusahaan hanya memberikan sumbangan dana jika warga meminta. Alasan lain perusahaan tidak mengadakan pelatihan karena terkendala pada kondisi perusahaan yang mengalami kerugian bahkan sempat ditutup beberapa kali. Atau perusahaan belum berfikir sampai sejauh itu.

Dari uraian diatas maka terkait dengan penyikapan perusahaan terhadap pelaksanaan CSR dapat dianalisis bahwa perusahaan secara umum sudah tidak bersikap reaktif terhadap pelaksanaan CSR. Ini bisa dilihat dari sikap perusahaan yang dalam prakteknya sebagian besar manajemen perusahaan mendukung

pelaksanaan CSR. Begitu juga sikap perusahaan terhadap entitas sosial atau masyarakat sosial sebagian besar merasa mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sosial. Hanya untuk masalah-masalah yang terkait dengan pelaporan atas kondisi lingkungan sosial dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat disekitar belum dilaksanakan secara maksimal, meskipun kedua aspek tersebut sudah dilaksanakan.

2. Sikap Defensif

Sikap defensif perusahaan terkait dengan CSR dapat diukur atau diketahui melalui penyikapannya terhadap 3 (tiga) faktor, yaitu pertama penyikapan perusahaan terhadap isu-isu lingkungan sosial disekitar perusahaan. Kedua, sikap perusahaan yang selalu atau tergantung pada kebijakan pemerintah atas pelaporan dampak lingkungan. Dan ketiga, adalah dukungan pihak manajemen terhadap keikutsertaan masyarakat dan karyawan perusahaan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.

Dari hasil survei diketahui bahwa penyikapan perusahaan terhadap isu-isu lingkungan sosial di sekitar perusahaan, sebanyak 50% menganggap penting dan 50% menganggap biasa-biasa saja. Dianggap penting karena perusahaan hidup di tengah-tengah masyarakat di mana budayanya berbeda-beda antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Selain itu perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya merasa saling membutuhkan. Juga perusahaan merasa sebagai satu kesatuan dengan masyarakat.

Sikap perusahaan terhadap kebijakan pemerintah atas pelaporan dampak lingkungan sebanyak 50% dalam hal pelaporan dampak lingkungan selalu tergantung pada kebijakan pemerintah dan 50% tidak tergantung pada kebijakan pemerintah terkait dengan pelaporan dampak pelaporan dampak lingkungan.

Selanjutnya tentang dukungan pihak manajemen terhadap keikutsertaan masyarakat dan karyawan perusahaan dalam pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan sebanyak 46% pihak manajemen perusahaan mendukung keterlibatan masyarakat dan karyawan dalam keikutsertaan dalam pelatihan lingkungan sosial perusahaan. Sedangkan 54% pihak manajemen perusahaan tidak mendukung keterlibatan keikutsertaan masyarakat dan karyawan perusahaan dalam pelatihan tentang

lingkungan sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian data di atas terkait penyikapan perusahaan atas CSR perusahaan tidak defensif, hanya perusahaan perlu lebih didorong untuk tidak terlalu tergantung kepada pemerintah soal pelaporan tentang dampak lingkungan. Juga perusahaan perlu didorong untuk lebih besar dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dan karyawannya untuk ikuti serta dalam pelatihan-pelatihan tentang lingkungan sosial.

3. Sikap Akomodatif

Sikap akomodatif perusahaan terkait dengan CSR dapat diukur atau diketahui melalui penyikapannya terhadap 3 (tiga) faktor, yaitu pertama, terdapat kebijakan di tingkat Top Level terkait lingkungan sosial perusahaan. Kedua, laporan tahunan dilaporkan secara internal dan sebagian kecil dilaporkan ke eksternal. Ketiga, terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.

Melalui survei diketahui bahwa kebijakan di tingkat Top Level terkait lingkungan perusahaan menyebutkan 54% terdapat kebijakan tentang lingkungan sosial perusahaan di tingkat top level dan 46% tidak ada kebijakan terkait dengan lingkungan sosial perusahaan.

Sementara terkait dengan laporan tahunan apakah perusahaan melaporkan secara internal dan hanya sebagian kecil saja dilaporkan ke kalangan eksternal dapat diperoleh hasil bahwa rata-rata lebih dari 75% mengatakan bahwa laporan tahunan hanya diberikan ke pihak internal saja. Sedangkan selebihnya, yaitu 25% dilaporkan juga ke pihak eksternal melalui penerbitan majalah yang mereka miliki.

Dukungan terhadap beberapa karyawan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan dapat diketahui, bahwa hanya 25% yang perusahaannya mendukung karyawannya mengikuti pelatihan terkait dengan lingkungan sosial. Sementara selebihnya yaitu 75% perusahaan belum atau tidak mendukung karyawan mengikuti. Pelatihan terkait dengan lingkungan sosial. Hal ini disebabkan karena rata-rata perusahaan menganggap program-program tersebut bukan merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Dan pandangan perusahaan terkait dengan CSR masih sebatas hanya memberi sumbangan yang

sifatnya tidak mengikat.

Berdasarkan uraian data di atas terkait dengan penyikapan perusahaan atas CSR perusahaan kurang akomodatif terutama jika dikaitkan dengan keikutsertaan karyawannya dalam mengikuti pelatihan terkait dengan lingkungan sosial. Hal ini disebabkan karena rata-rata perusahaan menganggap CSR hanya sebatas memberi sesuatu kepada lingkungannya. Setelah itu selesai. Belum menjangkau kepada makna dan cakupan CSR yang lebih luas. Misalnya sampai memperhatikan ke hal-hal yang sifatnya spesifik seperti pelatihan-pelatihan bagi karyawannya terkait dengan kondisi lingkungan sosial perusahaannya.

4. Sikap Pro Aktif

Sikap pro aktif perusahaan terkait dengan CSR dapat diukur atau diketahui melalui penyikapannya terhadap 3 (tiga) faktor, yaitu pertama, dukungan *top level* manajemen mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan. Kedua, laporan tahunan atau *annual report* selalu dilaporkan baik secara internal maupun eksternal dengan porsi yang sama. Ketiga, masyarakat dan karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan.

Dari hasil survei diketahui, bahwa dukungan *top level* manajemen mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan menyebutkan 70,8% mendukung mengenai isu-isu lingkungan sosial yang terjadi disekitar perusahaannya. Karena mereka (perusahaan) merasa perusahaan hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat dan ingin memberdayakan mereka. Atau ingin membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Sementara sisanya yaitu 29,2% tidak mendukung karena mereka berpendapat sudah memberikan sumbangan, mereka merasa telah ada terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat, atau mereka akan tergerak jika diminta untuk bereaksi.

Laporan tahunan atau Annual Report 95% hanya dilaporkan kepada pihak intern saja, hanya 5% yang melaporkan *Annual Report* secara seimbang ke pihak internal maupun eksternal. Begitu juga kesempatan memperoleh pelatihan secara seimbang dan berkesinambungan antara masyarakat dan karyawan dengan topik lingkungan sosial juga 77% masyarakat dan karyawan tidak memperoleh pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan terkait dengan

masalah-masalah lingkungan sosial perusahaan, hanya 13% yang mendapatkannya.

Berdasarkan uraian data di atas terkait dengan penyikapan perusahaan atas CSR perusahaan kurang pro aktif dalam menanggapi CSR. Hal ini sama seperti sikapnya yang kurang akomodatif terutama jika dikaitkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan lingkungan sosial. Ini disebabkan karena rata-rata perusahaan menganggap CSR hanya sebatas memberi sesuatu kepada warga lingkungannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar perusahaan yang disurvei di wilayah kabupaten Sidoarjo (99%) sudah mengenal dan paham tentang CSR. Begitu juga sebanyak 77% responden menyatakan bahwa sifat pelaksanaan CSR menurut mereka adalah bersifat sukarena dan 33% mengatakan CSR wajib dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Sementara implementasi daripada CSR terfokus pada bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
2. Perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR sebanyak 8%. Hal ini disebabkan karena ketidak pahaman tentang CSR. Sementara 92% responden yang melaksanakan CSR paling banyak memprogramkan pelaksanaan CSR pada bidang sosial (34%) dan ekonomi (21%). Bahkan banyak juga (30%) responden yang melaksanakan program CSR pada semua bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
3. Penyikapan atau sikap perusahaan yang disurvei berada pada tingkatan defensif atas keberadaan CSR selama ini. Belum sampai kepada tahapan yang akomodatif dan pro aktif, hal ini diindikasikan dengan laporan tahunan atau *annual report* terkait dengan lingkungan sosial masyarakat masih bersifat internal (75%) dan belum disampaikan kepada publik (25%). Juga *top management* belum sepenuhnya mendukung karyawan dan masyarakat untuk dilibatkan secara besar-besaran pada pelatihan-pelatihan terkait dengan

isu-isu lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat dan karyawan yang dilibatkan dalam pelatihan tersebut hanya berjumlah 25%.

4. Pemahaman perusahaan terhadap CSR hanya sebatas memberi sekedarnya, dan belum masuk sampai pada hal-hal yang sifatnya substansial seperti aplikasi nyata pada permasalahan-permasalahan isu-isu lingkungan sosial kemasyarakatan. Jadi masih sekadang *lips service* dan belum pada tahap aplikasi.

B. Rekomendasi

Untuk lebih memberdayakan program CSR di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo direkomendasikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, mengupayakan kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan sikapnya terhadap keberadaan CSR yang selama ini defensif agar didorong lebih bersikap akomodatif dan pro aktif dalam melaksanakan program CSR.

Kedua, untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan lebih bersikap akomodatif dan pro aktif terhadap pelaksanaan program CSR, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menugaskan atau menunjuk kepada salah satu satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD untuk bertugas menangani dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR. SKPD yang dimaksud bisa sekretariat daerah atau Bappemas atau SKPD lainnya yang dianggap tepat.

Ketiga, untuk lebih menegaskan lagi apakah sifat pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan itu sebagai suatu kewajiban atau sesuatu yang sifatnya sukarela, maka jika memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun rancangan peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan program CSR agar perusahaan-perusahaan bisa lebih akomodatif dan pro aktif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

-, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
-, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
-, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 - 2010.
- Maksum, 2003. *Pelaksanaan Program CSR Perusahaan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Edisi ke Dua, Yogyakarta.
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis Buku 1 dan 2*. Penerbit Salemba Empat, Edisi 4, Jakarta.
- Wahyudi, Isa & Azheri, Busyra, 2008. *Corporate Social Responsibility-Prinsip, Pengaturan dan Implikasi*. Penerbit In-Trans Publishing, Cetakan Pertama, Malang.
- Zafrullah TN, Ahmad & Suyanto, Bagong, 2008. *Menggugat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Zarkasyi, M. Wahyudin, 2008. *Good Corporate Governance*. Penerbit Alfabeta, Cetakan Pertama, Bandung.